



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

EDISI XXIII

Periode 18 – 30 Oktober 2021

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH



Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Kindy Rinaldi Syahrir • Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo • Miftah Chalamsa
Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring
Desy Puspita A • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa • Khishbatur Rizqiyah

INOVASI DAERAH

DAFTAR ISI

3

Highlight

4

Kinerja Perekonomian Daerah

4

Kinerja TKDD Daerah

5

Kinerja Fiskal Daerah

6 - 8

Kinerja Daerah

9 - 11

Editorial

12 - 13

Inovasi Daerah

14 - 17

Kabar Daerah

18 - 19

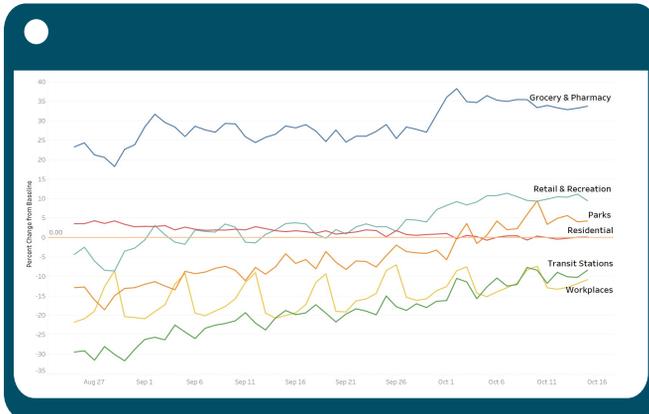
Kajian Daerah

HIGHLIGHT

- Berdasarkan analisis menggunakan variabel mobility index dan COVID-19 intensity index change per 30 September 2021, terlihat bahwa tujuh wilayah provinsi masuk ke dalam kuadran I yang menunjukkan bahwa ekonomi dan kesehatan telah membaik.
- Kinerja penyaluran TKDD s.d. 19 Oktober 2021 sebesar Rp583,4T mengalami penurunan 12,0% dibandingkan realisasi s.d. 19 Oktober 2020 sebesar Rp665,3T. Adapun, DAU mengalami penurunan sebesar 3,1% akibat penambahan persyaratan kinerja mulai Februari 2021. Sedangkan DBH, DTK, dan Dana Desa mengalami penurunan sebesar 35,3% ; 16,7% ; dan 8,3% berturut-turut.
- Secara YoY, baik realisasi pendapatan maupun belanja s.d. September 2021 mengalami kontraksi sebesar 9,49% dan 1,65% secara berturut-turut. Adapun dari sisi pembiayaan, Pembiayaan Netto turun sebesar 3,81% secara YoY. Lebih lanjut, dalam rangka pemanfaatan alternatif pembiayaan sebagai instrumen percepatan pemulihan ekonomi, penerimaan Pinjaman Daerah naik sebesar 145,69% dari Rp1,26 T menjadi Rp3,09 T.
- Kinerja Daerah yang menjadi fokus pada edisi kali ini adalah Opini BPK atas LKPD. Berdasarkan pemantauan kinerja atas 13 daerah dengan WTP berturut-turut selama 10 tahun, ternyata memiliki kinerja layanan publik dan kesejahteraan yang bervariasi. Mixed findings serupa juga ditemui pada analisis kuadran hasil analisis kuadran atas kinerja dari daerah dengan opini WTP dan opini selain WTP. Untuk itu perlu adanya analisis lebih dalam untuk melihat dampak capaian opini LKPD terhadap kinerja daerah.
- Pada halaman editorial, tema yang diangkat adalah terkait Opini LKPD dan kinerja daerah. Pada 2021, mayoritas daerah telah memperoleh WTP menunjukkan bahwa Pemda telah mampu mempertanggungjawabkan dan melaporkan keuangannya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, kasus korupsi di daerah tetap marak dan kinerja peningkatan kesejahteraan di daerah masih perlu dioptimalkan. Untuk itu, di masa depan, pengelolaan keuangan daerah harus terus ditingkatkan kualitasnya baik dari sisi administrasi maupun substansi.
- Laporan ini menyajikan pula kabar terkini di daerah mengenai respon Daerah atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dirilis oleh BPK, diantaranya Kabupaten Jember yang memperoleh opini Tidak Wajar, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi NTB, beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Brebes dengan Opini WTP, serta Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Opini TMP.
- Adapun inovasi daerah yang disajikan dalam laporan ini adalah inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yakni Inovasi Sistem Pelaporan Keuangan. Selain itu, kajian pilihan yang diangkat adalah tentang Analisis Dampak Opini BPK terhadap Capaian Layanan Publik.

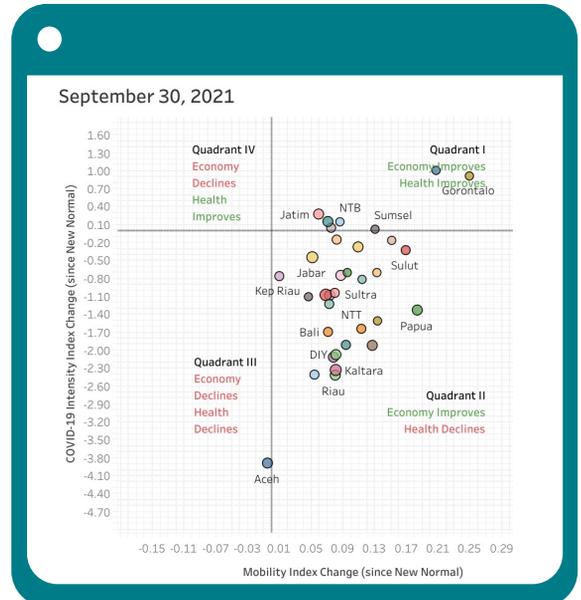
KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH

AKTIVITAS PEREKONOMIAN BERDASARKAN MOBILITY INDEX



*Data google mobility dan CSIS

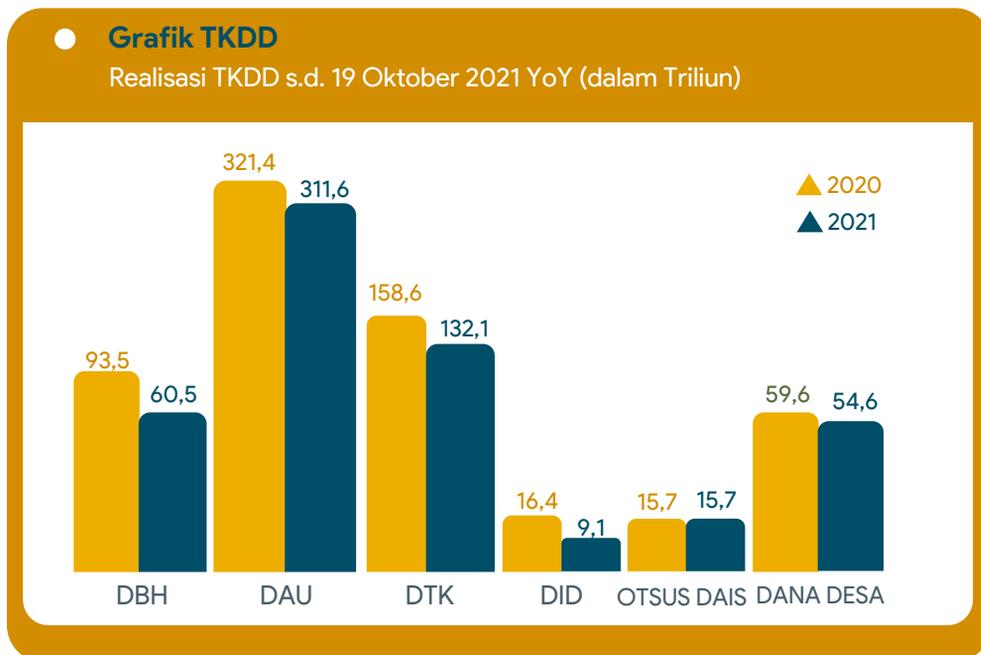
- Aktivitas **perekonomian** selama 25 Agustus s.d. 15 Oktober 2021, berdasarkan *mobility index**, terlihat sektor **Retail & Recreation, Parks, dan Transit Stations** mengalami peningkatan aktivitas yang cukup signifikan.
- Berdasarkan analisis kuadran dengan menggunakan variabel *mobility index* dan *COVID-19 intensity index change** per 30 September 2021, terlihat bahwa sejumlah wilayah sudah masuk ke Kuadran I (Ekonomi dan Kesehatan membaik), terutama di **Maluku Utara dan Gorontalo**.



KINERJA TKDD DAERAH

4

OPINI LAPKEU PEMDA



- Secara YoY, realisasi TKDD s.d. 19 Oktober 2021 sebesar Rp583,4 T mengalami **penurunan 12,0%** dibandingkan realisasi s.d. 19 Oktober 2020 sebesar Rp665,3 T.
- DAU** mengalami **penurunan sebesar 3,1%** akibat adanya penambahan persyaratan kinerja mulai DAU Februari 2021. Sedangkan **DBH** mengalami **penurunan sebesar 35,3%**, **DTK** turun **16,7%**, dan **Dana Desa** menurun sebesar **8,3%**.
- Realisasi BLT sebesar **Rp17,03 T** kepada **5,62 juta KPM**.

KINERJA DAERAH

Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan salah satu konsekuensi dari implementasi UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dimana opini merupakan pernyataan profesional dari auditor eksternal negara terhadap empat kriteria dalam laporan keuangan pemerintah yaitu kesesuaian dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas sistem pengendalian internal dan kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*). Opini BPK merupakan salah satu indikator dalam menganalisis kualitas tata kelola pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Opini BPK pertama kali diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2004.

Pada rentang tahun 2010-2020, terdapat 13 daerah yang konsisten terus mendapatkan hasil opini BPK “WTP”. Apakah hasil opini terhadap laporan keuangan tersebut searah dengan kinerja pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakatnya? Tabel 1 berikut merupakan rangkumannya.

Tabel 1

Daerah yang memperoleh WTP pada tahun 2010-2020 dan indikator kinerja pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

No.	Daerah	AHH (2019)	TPT (2019)	IPM (2020)	% Penduduk Miskin (2020)	Gini Rasio (2019)	% Laju Pertumbuhan Ekonomi (2020)	Air Minum Layak (2019)	Sanitasi Layak (2019)	RLS (2020)
1	Kab. Ogan Komering Lir	68,41	2,91	66,82	14,73	0,28	0,24	72,45	67,48	7,04
2	Kota Lubuk Linggau	69,04	4,66	74,78	12,71	0,32	-0,13	94,6	87,58	9,89
3	Kab. Way Kanan	69,27	3,6	67,44	12,9	0,3	-1,16	38,61	71,88	7,7
4	Kota Metro	71,55	5,11	77,19	8,47	0,34	-1,79	86,39	88,33	10,96
5	Kab. Tulang Bawang Barat	69,88	3,59	65,97	7,39	0,32	-1,32	27,4	76,08	7,24
6	Prov. Jawa Barat	72,85	7,99	72,09	7,88	0,4	-2,44	92,3	69,64	8,55
7	Kota Banjar	70,79	6,1	71,7	6,09	0,3	1,04	95,67	88,21	8,63
8	Kab. Boyolali	75,83	3,12	74,25	10,18	0,35	-1,24	92,96	90,52	7,84
9	Kab. Semarang	75,63	2,58	74,1	7,51	0,33	-2,67	98,26	87,54	8,02
10	Kota Surakarta	77,12	4,18	82,21	9,03	0,37	-1,74	98,04	92,63	10,69
11	Prov. Nusa Tenggara Barat	66,28	3,42	68,25	13,97	0,38	-0,64	93,93	80,02	7,31
12	Prov. Kepulauan Riau	69,8	6,91	75,59	5,92	0,34	-3,8	88,51	89,13	10,12
13	Kab. Bintan	70,3	8,01	74,13	6,36	0,3	-4,28	74,26	81,1	8,44
Indonesia		71,34	5,28	71,94	10,19	0,38	-2,07	89,27	77,39	8,48
Jumlah daerah berkinerja lebih baik dari nasional		5	9	8	9	12	9	7	9	6

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, indikator pemerataan Gini Rasio menunjukkan indikator yang terbaik dimana 12 dari 13 daerah menunjukkan ketimpangan pendapatannya di bawah tingkat nasional, dan hanya satu daerah yakni Jawa Barat yang memiliki Gini Rasio di atas nasional. Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat, merupakan indikator yang terlemah dimana hanya 5 dari 13 daerah yang menunjukkan angka AHH di atas nasional.

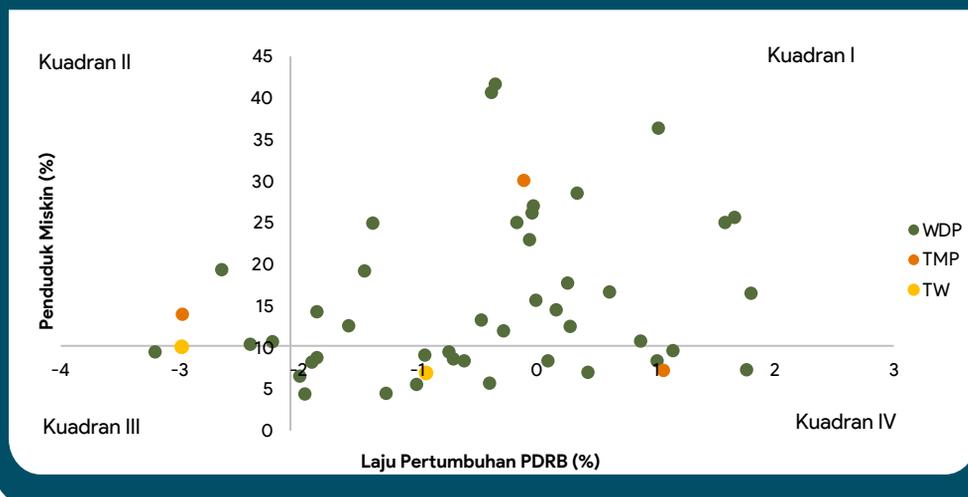
Tabel 1 di atas memberikan indikasi sementara bahwa daerah yang memperoleh WTP secara terus menerus, belum tentu indikator kinerja pelayanan publik dan kesejahteraan rakyatnya lebih baik dari level nasional. Perlu kajian lebih lanjut untuk melihat kausalitas dari opini BPK dan variabel-variabel tersebut di atas.

KINERJA DAERAH

Hubungan antara Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan Ekonomi dan Kemiskinan di Daerah

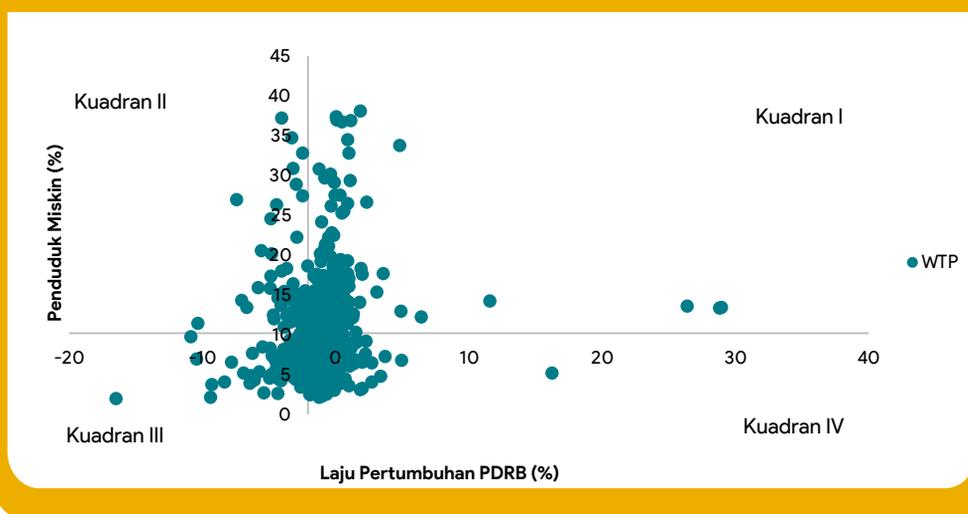
Grafik 1

Distribusi Opini BPK selain WTP



Grafik 2

Distribusi Opini BPK WTP



Grafik 1 dan 2 menunjukkan sebaran daerah dengan Opini BPK WTP dan selain WTP dibandingkan dengan performa ekonominya. Dapat dilihat bahwa mayoritas daerah telah menyandang status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 91% (485 daerah). Banyaknya daerah yang telah mendapatkan status WTP menjadi indikasi bahwa sebagian besar daerah telah berhasil memenuhi kriteria pelaporan sesuai ketentuan BPK. Adapun rincian Opini BPK selain WTP terdiri dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP (8,1%)), Tidak Memberikan Pendapat (TMP (0,6%)), dan Tidak Wajar (TW (0,4%)). Lebih lanjut, persebarannya cukup acak dan kurang memiliki pola. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan membandingkan terhadap laju pertumbuhan PDB nasional tahun 2020 (-2,07%) dan persentase penduduk miskin nasional tahun 2020 (10,19%) dalam bentuk kuadran.

KINERJA DAERAH

Hubungan antara Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan Ekonomi dan Kemiskinan di Daerah



Grafik 1
Distribusi Opini BPK selain WTP

Grafik 1 menunjukkan sebaran daerah yang memiliki Opini BPK selain WTP. Berdasarkan analisis kuadran, didapatkan hasil bahwa sebagian besar daerah dengan status WDP berada di kuadran I termasuk 1 daerah dengan status TMP yakni Kab. Pegunungan Bintang. Kuadran I menunjukkan daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi di atas capaian nasional, namun persentase jumlah penduduk miskin juga di atas capaian nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah-daerah tersebut kurang optimal untuk mengentaskan kemiskinan.



Grafik 2
Distribusi Opini BPK WTP

Grafik 2 menunjukkan sebaran daerah yang memiliki Opini BPK WTP. Berdasarkan analisis yang sama, didapatkan hasil bahwa sebagian besar daerah dengan status WTP secara konvergen memiliki laju pertumbuhan penduduk antara -5,0% s.d 10,0% di tahun 2020 dengan jumlah penduduk miskin antara 5-20% dari populasi daerah bersangkutan. Oleh karena variasi persebaran data yang relatif sempit, maka terdapat korelasi yang terbatas antara variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dengan kategori Opini BPK WTP.

Berdasarkan hasil analisis kedua grafik di atas, dapat disampaikan bahwa untuk tahun 2020, indikator Opini BPK diduga kurang dapat menggambarkan pengaruh kualitas tata kelola pemerintahan terhadap performa ekonomi suatu daerah. Hal ini disebabkan karena lebih dari 90% daerah telah menyandang status WTP sehingga variasi data cenderung terbatas, di samping itu, sebaran daerah juga tidak menunjukkan pola yang bersifat konklusif. Oleh karena itu, dibutuhkan indikator yang lebih mendalam untuk dapat menggambarkan kualitas tata kelola pemerintahan secara lebih komprehensif dan andal untuk menilai pengaruhnya terhadap performa ekonomi suatu daerah.

EDITORIAL

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Selama dua dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kepala pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bentuk tanggung jawab tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Atas laporan keuangan tersebut, selanjutnya BPK akan menerbitkan laporan audit dan memberikan opini audit yang menyatakan kewajaran informasi keuangan yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini audit atas laporan keuangan berkaitan dengan isi laporan keuangan itu sendiri, khususnya apakah memenuhi kriteria yang dimaksudkan, seperti kesesuaian dengan standar, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan.

Trend Perkembangan Opini BPK



WTP 2009



WTP 2014



WTP 2021

- 0,7% LKPD : WDP
- 0,4% LKPD : Tidak Wajar

Trend perkembangan opini BPK terhadap LKPD menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam opini audit BPK dengan semakin meningkatkan jumlah LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kategori tertinggi dalam opini BPK. Pencapaian opini BPK yang baik pada tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa **486 Pemda dari 542 Pemda**, baik pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi, **sudah mampu mempertanggungjawabkan dan melaporkan keuangannya dengan baik** karena LKPD sudah sesuai dengan standar, memenuhi kecukupan pengungkapan, dan patuh terhadap peraturan.

Kasus Korupsi Kepala Daerah (2005–2020)



Meningkatnya perbaikan opini BPK terhadap LKPD merupakan berita yang menggembirakan dalam perjalanan otonomi daerah di Indonesia yang sudah mencapai 20 tahun. Dengan semakin meningkatnya jumlah Pemda yang memperoleh opini WTP secara signifikan diharapkan tingkat korupsi di daerah juga dapat menurun secara signifikan. Namun demikian, **menarik untuk dikaji pengaruh perbaikan opini BPK tersebut terhadap penurunan tingkat korupsi di tingkat pemerintah daerah**, khususnya korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Sumber: www.freepik.com

Banyaknya kepala daerah terlibat korupsi memang menjadi pertanyaan yang perlu didalami, apakah opini BPK terhadap laporan LKPD dapat mencerminkan perbaikan tata kelola pemerintah daerah secara substantif, bukan hanya administratif sehingga tingkat korupsi di daerah semakin berkurang. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemerintah daerah terhadap penilaian opini BPK, namun demikian perbaikan pengelolaan keuangan harus sejalan antara perbaikan secara administratif dan substantif.

Beberapa penelitian mencoba menjawab pertanyaan berikut:

“ apakah peningkatan opini BPK memberikan dampak positif pada akuntabilitas keuangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat?

Pertama, Salle dan Antoh (2019) mengungkapkan bahwa **perbaikan kualitas opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berbanding lurus dengan persepsi korupsi**, artinya bahwa meskipun opini BPK telah meningkat, namun dipersepsikan bahwa korupsi itu masih tetap sama seperti sebelumnya. Penelitian ini mengambil responden ASN Pemda Kabupaten, Kota dan Provinsi se-Papua yang sedang menempuh pendidikan Magister Akuntansi, Magister Keuangan Daerah dan Magister Ekonomi di Universitas Cenderawasih, yang juga berarti bahwa latar belakang pendidikan responden minimal adalah sarjana.

Sejalan dengan itu, Suyatmiko (2021) dari Transparency International Indonesia mengungkapkan bahwa tahun 2019, Indonesia *Corruption Perception Index (CPI)* Indonesia sempat mencapai 40/100, tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Namun tahun 2020 skor tersebut turun menjadi 37, dan Indonesia berada pada peringkat 102 dari 108 negara. Fakta-fakta di atas menjadi salah satu penyebab mengapa CPI Indonesia tetap rendah meskipun opini BPK atas laporan keuangan Pemda dan laporan keuangan pemerintah secara umum, di atas kertas mengalami perbaikan.

Kedua, penelitian di atas menunjukkan bahwa **opini BPK yang baik hanyalah satu alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat**, sehingga kesejahteraan adalah target utama yang harus dikejar oleh pemerintah daerah. Di penelitian pertama yang dilaksanakan di Papua, opini BPK tidak berpengaruh pada persepsi korupsi karena Pemda menjadikan opini tersebut sebagai tujuan, sedangkan kesejahteraan masyarakat malah terlupakan. Hal ini ditunjukkan dengan IPM Provinsi Papua adalah yang terendah di Indonesia. BPS merilis Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2020, yang menunjukkan bahwa IPAK masyarakat di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan, dan semakin tinggi pendidikan masyarakat maka IPAK juga semakin tinggi, yang menunjukkan bahwa pemahaman seseorang untuk menjauhi tindakan korupsi akan semakin baik.

EDITORIAL

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan semakin banyaknya daerah yang telah mendapatkan opini WTP, **tujuan tata kelola pengelolaan keuangan daerah** seyogianya mulai bergeser tidak hanya yang bersifat administratif atau yang bersifat penyajian, namun juga harus terus didorong untuk hal-hal yang bersifat substantif seperti adanya peningkatan kualitas belanja daerah.



Sumber: www.freepik.com

Peningkatan kualitas belanja daerah tidak hanya bertumpu kepada seberapa baik daerah dalam merealisasikan anggaran. Lebih dari itu, daerah juga harus mampu menyeimbangkan porsi belanja untuk aparatur sipil yang akan berpengaruh dengan pelayanan publik masyarakat dan untuk pembangunan infrastruktur daerah guna menjamin tersedianya akses pelayanan dasar masyarakat dan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Perencanaan belanja daerah juga harus dilakukan dengan menekankan prinsip efisiensi dan berdasarkan standar harga yang wajar. Pemerintah menyadari masih terdapat ketimpangan daerah dalam menyusun perencanaan terkait belanja daerah. Salah satu tantangan dalam perencanaan belanja daerah adalah bagaimana daerah dapat menyeimbangkan porsi belanja pegawai dengan mandatory spending dan kebutuhan atas belanja infrastruktur. Penguatan belanja infrastruktur pelayanan publik diperlukan untuk mendorong perbaikan-perbaikan capaian layanan publik. Oleh karena itu, **dibutuhkan standarisasi belanja daerah, utamanya untuk belanja pegawai dan belanja infrastruktur**, sehingga, baik pelayanan publik maupun kebutuhan infrastruktur layanan dapat tetap dipenuhi dalam jumlah yang rasional.

Perbaikan pengelolaan keuangan daerah juga tidak lepas dari adanya SDM yang kompeten dan memahami prinsip tata kelola keuangan dengan baik. Penting sekali diketahui bahwa **untuk menghasilkan LKPD yang berkualitas juga perlu dukungan SDM yang memahami tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan sesuai standar yang berlaku**. SDM pengelola keuangan daerah merupakan mereka yang sudah mendapatkan sertifikasi pengelolaan keuangan daerah dan kompetensi lainnya yang mendukung. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Penguatan pengawasan yang dilakukan Pemerintah melalui APIP (BPKP) ini ditujukan untuk meningkatkan *awareness* daerah dalam mengelola keuangan daerah. Selain melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, APIP juga dapat meningkatkan kapabilitas aparat pengawas intern daerah, sehingga sinergi pengawasan pengelolaan keuangan daerah semakin baik.

Standarisasi belanja, sertifikasi SDM pengelola keuangan daerah, dan penguatan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, merupakan langkah-langkah yang perlu terus didorong oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas tata kelola belanja daerah yang tentunya juga akan berdampak kepada peningkatan kualitas LKPD.

INOVASI DAERAH

HOME

INOVASI

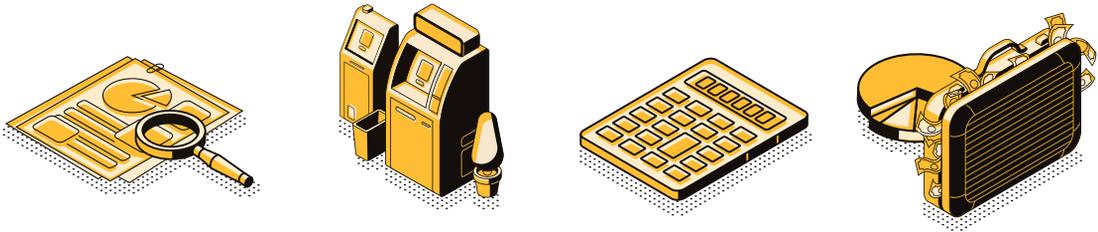
ABOUT

Inovasi Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Kabupaten Belitung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belitung pada tahun 2005. Di Tahun 2021, APBD Kabupaten Belitung Timur direncanakan sebesar Rp967 Miliar untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

INOVASI

Apresiasi Ketepatan Alokasi Bidang Pendidikan dan Ketepatan Alokasi Bidang Kesehatan



Kabupaten Belitung Timur berhasil menyabet **dua penghargaan Indeks Kelola Tahun 2019** untuk keunggulan dalam **Kinerja dan Efektifitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**. Dua penghargaan itu meliputi **Apresiasi Ketepatan Alokasi Bidang Pendidikan dan Apresiasi Ketepatan Alokasi Bidang Kesehatan**. Pemkab Belitung Timur dinilai berhasil dan efektif dalam mengelola anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta berdampak signifikan untuk perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kesejahteraan.

Selain itu, Pemkab Belitung Timur juga berhasil mengoptimalkan alokasi anggarannya dan fokus pada pencapaian hasil pembangunan serta memprioritaskan APBD untuk menghasilkan aset bagi daerah bukan hanya aset fisik namun juga aset pembangunan manusia.

INOVASI

Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Daring Berbasis Jaringan Cloud (SIMCLOUD)

Inovasi Pemkab Belitung Timur di bidang sistem pelaporan keuangan pemda antara lain adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan daring berbasis jaringan Cloud (SIMCLOUD). SIMCLOUD merupakan turunan aplikasi cloud dan SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh tim dari BPKPD dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur. **Aplikasi terintegrasi itu meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan** dan aplikasi ini telah diterapkan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan adanya aplikasi ini, SIMDA Keuangan yang dulunya hanya bisa diakses melalui komputer kini dapat diakses lewat gawai, di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, aplikasi tersebut juga sangat mendukung penerapan e-Government di Pemkab Belitung Timur.

INOVASI DAERAH

HOME

INOVASI

ABOUT

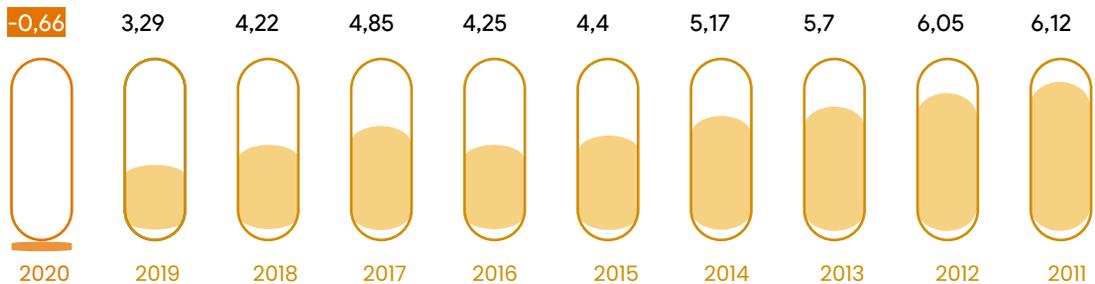
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKTD

ABOUT

Pengelolaan keuangan Pemkab Belitung Timur dari tahun ke tahun juga berjalan semakin baik dan berhasil meraih dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebanyak dua kali berturut-turut. Di tahun 2019, untuk yang pertama kalinya setelah tujuh belas tahun lamanya akhirnya Pemkab Belitung Timur berhasil meraih predikat WTP atas LKPD TA 2019 berkat keberhasilannya dalam menyelesaikan permasalahan terkait Aset Tetap. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut berdampak positif pada *outcome* yaitu capaian indikator kemakmuran berupa kemiskinan, pengangguran, gini rasio dan empat indikator lain yang capaiannya semakin membaik dari tahun ke tahun. Demikian pula pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur juga cukup baik yaitu dengan kisaran 5% pertahun untuk tahun 2011 s.d 2017, meskipun sedikit stagnan di tahun 2018 s.d. 2019 dan turun menjadi minus 0,66% di tahun 2020 dikarenakan dampak dari pandemi covid-19.

ABOUT

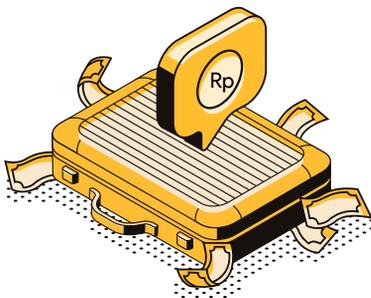
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Persen) Kab. Belitung Timur



13



Tahun 2021, Pemkab Belitung Timur menerima penghargaan berupa DID sebesar Rp17 miliar



Atas prestasi dan inovasi yang telah dilakukan Pemkab Belitung Timur dalam pengelolaan keuangan daerah serta keberhasilan dalam memperoleh opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2019, akhirnya di tahun 2021 Pemkab Belitung Timur untuk pertama kali memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 17 miliar yang penggunaannya untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, termasuk juga untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di kab. Belitung Timur.

KABAR DAERAH

Kota Depok

➤➤➤ <https://www.antaranews.com>

Laporan Keuangan Kota Depok (LKPD) Tahun 2020, berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat dan ini merupakan capaian 10 kali berturut-turut. Wali Kota Depok merasa bangga atas prestasi tersebut dan mengatakan bahwa hasil yang didapat merupakan kontribusi dari seluruh perangkat daerah, termasuk Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Inspektorat yang terus memantau dan evaluasi terhadap laporan keuangan yang diberikan setiap perangkat daerah. Semoga capaian tersebut menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik dalam pengelolaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), juga informasi keuangan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, transparan, dan akuntabel. Kepala BKD Depok (selaku koordinator) terus memantau dan mengevaluasi laporan yang diberikan setiap perangkat daerah mengingat ketepatan dalam penyampaian laporan keuangan menjadi penilaian utama.

Provinsi DKI Jakarta

➤➤➤ <https://metro.tempo.co> dan <https://www.kompas.tv>

Pada Rapat Paripurna di DPRD DKI (Senin, 31 Mei 2021), Gubernur DKI Jakarta menyambut baik dan bersyukur atas diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta Tahun 2020. Predikat WTP ini merupakan yang keempat kalinya secara berturut-turut diraih oleh DKI. Menurut gubernur, predikat WTP bukan tujuan akhir karena Pemprov DKI harus terus melakukan perbaikan dan pengembangan sistem informasi daerah, termasuk peningkatan dan penguatan APBD. Setahun yang lalu, tepatnya Senin, 22 Juni 2020, Gubernur DKI Jakarta sudah mengungkapkan bahwa ada kiat-kiat yang dilakukan sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan yang akhirnya berbuah opini WTP yaitu melalui peningkatan kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan serta implementasi transaksi non tunai, sehingga seluruh aliran dana APBD dapat ditelusuri secara transparan dan akuntabel. Usaha lain yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah (1) penyempurnaan proses penganggaran yang terintegrasi; (2) penyempurnaan peningkatan akuntabilitas sistem administrasi pendapatan daerah melalui program *non cash revenue system* yang terkoneksi secara *online* dengan perbankan; (3) penyempurnaan pembenahan administrasi belanja daerah melalui transaksi non tunai dan pelaksanaan jurnal dan tutup buku harian; (4) penyempurnaan sistem administrasi penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah melalui implementasi transaksi non tunai dan penerapan sistem penganggaran dan sistem penatausahaan belanja yang terintegrasi dengan sistem perbankan dan sistem direktorat jendral pajak; (5) penyempurnaan pembenahan penatausahaan aset daerah, dengan melakukan penyempurnaan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah. Pemprov DKI Jakarta juga melakukan implementasi dan integrasi sistem pembayaran dan pembayaran pajak ke kas negara dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara untuk memastikan akurasi serta ketepatan pembayaran dan pelaporan pajak secara *online* dan *realtime*. Termasuk pula melakukan percepatan pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK RI melalui penetapan pelaksanaan tindak lanjut sebagai *Key Performance Indikator* (KPI) SKPD.

Kota Bekasi

➤➤➤ <https://www.republika.co.id>

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak enam kali secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat. Pemberian predikat ini diumumkan oleh Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat pada gelombang pertama penilaian daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat (Selasa, 18 Mei 2021). Kota Bekasi bukan hanya mendapatkan predikat WTP namun Kota Bekasi juga tercatat sebagai salah satu kota tercepat dalam menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini WTP yang diperoleh karena penyusunan laporan keuangan daerah sudah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan, sesuai dengan dasar hukum, kecukupan pengungkapan, sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

KABAR DAERAH

Kabupaten Jember

➤➤➤ <https://www.antaranews.com>

Bupati Jember menargetkan untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021, setelah dua tahun mendapatkan opini *disclaimer* tahun 2019 dan opini *tidak wajar* tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK RI Perwakilan Jawa Timur memberikan penilaian opini tidak wajar atas LKPD Tahun Anggaran 2020 karena ada tujuh poin yang bersifat material yang menyebabkan LKPD Jember tidak disajikan secara wajar, diantaranya adalah : (1) tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020; (2) jumlah penyajian belanja pegawai sebesar Rp1.302,44 miliar serta belanja barang dan jasa sebesar Rp937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (*mapping*) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada laporan operasional yang mengakibatkan belanja pegawai disajikan lebih rendah sedangkan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp202,78 miliar; (3) realisasi pembayaran senilai Rp68,80 miliar dari angka Rp1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai yang tidak menggambarkan substansi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi, karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pengamat komunikasi politik Universitas Jember, Dr Muhammad Iqbal, menyatakan lima dari tujuh poin catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan penilaian opini Tidak Wajar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember Tahun Anggaran 2020 dapat berpotensi pidana. Ia menguraikan, *pertama* yakni ada Rp202,78 miliar atas belanja barang dan jasa yang laporannya disajikan lebih tinggi, sedangkan belanja pegawai disajikan lebih rendah, sehingga LHP BPK menilai itu sebagai tidak wajar karena tidak sesuai dengan penjabaran APBD. Hal tersebut berpotensi terindikasi ada praktik manipulasi laporan keuangan. *Kedua*, ditemukan Rp107,09 miliar laporan kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan sangat berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan. *Ketiga*, ada Rp66,59 miliar realisasi belanja Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tanpa rekapitulasi, sehingga tidak dapat diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. *Keempat*, ada Rp68,80 miliar realisasi pembayaran belanja pegawai yang tidak sesuai dengan SAP dan kesalahan penganggaran, kemudian terakhir ditemukan Rp31,57 miliar utang jangka pendek lainnya yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai. Kalau ditotal catatan nomor 2 sampai 5 saja terdapat senilai Rp274,05 miliar yang berpotensi terindikasi pidana. Ada dua langkah strategis untuk menyikapi opini LHP BPK tersebut, yaitu harus mematuhi UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan perlu mewujudkan spirit akselerasi, dengan bersinergi dan kolaborasi kepada seluruh pihak terutama ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

➤➤➤ <https://www.antaranews.com>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur memberikan opini Tidak Wajar (TW) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD dan Pemkab. Jember, Senin (31/5/2021). Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah dengan berdasar pada empat kriteria, yaitu: (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan; (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian internal. Ada 7 alasan yang membuat APBD Jember tahun 2020 mendapatkan opini TW dari BPK, yaitu: (1). Tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020, (2). Jumlah penyajian Belanja Pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (*mapping*) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada Laporan Operasional, (3). Terdapat realisasi pembayaran senilai Rp 68,80 miliar dari angka Rp 1.302,44 miliar yang disajikan dalam Belanja Pegawai, yang tidak menggambarkan substansi Belanja Pegawai sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi Belanja Pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan), (4). Dari jumlah Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat sebesar Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank sesuai ketentuan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan, (5). Terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp 31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp 111,94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai, (6). Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp 66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG. Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai Beban Persediaan, dan (7). Pada penyajian nilai perolehan Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan atas Aset Tetap -Jalan, Irigasi, dan Jaringan masing-masing sebesar Rp 3.470,53 miliar, Rp 2.007,36 miliar, dan Rp 141,46 miliar, terdapat Aset Tetap -Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan yang belum dan/atau tidak diatribusikan secara tepat ke aset induknya sehingga mempengaruhi akurasi perhitungan Beban dan Akumulasi Penyusutan. Apabila Pemkab. Jember melakukan atribusi aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan tersebut ke aset induknya secara tepat, maka penyajian nilai Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan akan berbeda secara signifikan.

KABAR DAERAH

Kabupaten Brebes

➤➤➤ <https://antikorupsibrebes.or.id>

Tahun 2021 Kabupaten Brebes kembali mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang kedua kalinya. Hal ini dapat menjadi satu indikator bahwa Kab. Brebes terus mengalami pembenahan, minimalnya pada wilayah administrasi. Opini WTP bukan sebuah ukuran bahwa suatu daerah sudah terbebas dari korupsi, akan tetapi opini WTP hanyalah sebagai indikator bahwa tata kelola anggaran sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). WTP hanya menunjukkan pengelolaan, tidak memperlihatkan penyimpangan. WTP hanyalah sasaran antara sebagai bukti sebuah lembaga negara memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sasaran utamanya tetap kesejahteraan masyarakat. Percuma saja mendapatkan opini WTP setiap tahun tapi masyarakatnya tidak sejahtera. Pemkab. Brebes diharapkan juga fokus terhadap percepatan pembangunan sambil bertahap melakukan perbaikan administrasi untuk tetap mendapat opini WTP. Menurut laporan BPS Provinsi Jawa Tengah, kondisi Pemkab Brebes adalah sekitar 20% penduduk merupakan warga miskin, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) berkisar di angka 63,18% jauh tertinggal dari Kabupaten dan Kota tetangga (Kota Tegal 72,96%, Kabupaten Tegal 65,4%). Jadi, apalah artinya “Wajar Tanpa Pengecualian atau Tertib Administrasi Bila Rakyatnya Tidak Sejahtera”.

Wilayah Jawa Timur

➤➤➤ <https://rri.co.id>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur Selasa, (11/5/2021), menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada empat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Surabaya. Berdasarkan LHP yang diserahkan, hasilnya adalah LKPD Kab. Banyuwangi WTP, LKPD Kab. Lamongan WTP, LKPD Kab. Pasuruan WTP, dan LKPD Kota Surabaya WTP. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK tersebut, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” penyajian laporan keuangan dan bukan merupakan “jaminan” bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya *fraud* atau tindakan kecurangan lainnya. Pemeriksaan atas LKPD TA 2020 terhadap empat pemerintah daerah tersebut, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Permasalahan tersebut di antaranya adalah (1) penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib; (2) terdapat kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa Paket Pekerjaan Belanja Modal; (3) terdapat penatausahaan Penerimaan Hibah Langsung bantuan penanganan Covid-19 dari masyarakat/pihak ketiga, yang belum diatur dengan mekanisme yang ditetapkan kepala daerah; (4) terdapat saldo Kas dari penerimaan jasa giro dana Jaminan Kesehatan Nasional dan dana Bantuan Operasional Sekolah yang belum disetorkan ke rekening Kas Daerah; dan (5) terdapat perlakuan akuntansi terkait koreksi kesalahan mendasar Laporan Perubahan Ekuitas yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. BPK meminta kepada pemerintah daerah harus tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP tersebut. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Provinsi Sumatera Barat

➤➤➤ <https://republika.co.id>

Badan Perwakilan Keuangan (BPK) Sumatera Barat (Sumbar) menemukan kejanggalan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumatera Barat 2020, meskipun sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Kepala Perwakilan, kejanggalan yang ditemukan adalah (1) pembayaran kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan oleh Dinas Pendidikan Sumbar sebesar Rp 516,7 juta yang pengangganan kegiatannya tidak sesuai ketentuan; (2) pengadaan barang untuk penanganan COVID-19 di BPBD Sumbar sebesar Rp 12,47 miliar yang juga tidak sesuai dengan ketentuan. Meskipun temuan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD, namun ada beberapa catatan untuk Pemprov Sumbar yaitu: (1) menyajikan realisasi belanja tak terduga sebesar RP 445,6 miliar yang diantaranya direalisasikan sebesar Rp 156,1 miliar untuk pengadaan barang dalam rangka penanganan COVID-19; (2) BPBD Sumbar tidak merancang dan melaksanakan suatu pengendalian yang memadai untuk pengadaan dalam rangka penanganan COVID-19.

KABAR DAERAH

Provinsi Jawa Tengah

➤➤➤ <https://ungarannews.com>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk Tahun Anggaran 2020 dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*. Meskipun memperoleh opini WTP, BPK masih menemukan adanya beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan oleh Pemprov Jateng, antara lain: (1) Pengelolaan **Belanja Bantuan Sosial untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM)** belum memadai; (2) **Kartu Jateng Sejahtera (KJS) TA 2020** belum sepenuhnya memadai; (3) Pengelolaan **Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)** belum dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2020; dan (4) **Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)** belum dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 24 Tahun 2020. Selain menyampaikan LHP atas LKPD TA 2020, BPK Perwakilan Prov. Jateng juga menyerahkan LHP Kinerja atas Efektivitas Kebijakan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah pada Pemprov Jawa Tengah TA 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020.

Kab. Banggai Kepulauan

➤➤➤ <https://rri.co.id>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *Disclaimer* atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (LKPD) Banggai Kepulauan Tahun 2020. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Prov. Sulawesi Tengah, Jumat (28/05/2021) dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2020. Hal ini terjadi karena, temuan pemeriksaan yang signifikan, tidak diperolehnya bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan serta penyajian laporan keuangan yang tidak dapat diyakini kewajaran sehingga BPK memberikan opini “Tidak Menyatakan Pendapat” atas LKPD Banggai Kepulauan tersebut. BPK menemukan kelemahan system pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang perlu mendapat perhatian khusus dan perbaikan, antara lain: (1). Penyusunan Laporan Keuangan Pemkab. Banggai Kepulauan TA 2020 tidak memadai yang mengakibatkan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan tidak handal; (2). Pengendalian dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa belum memadai yang terjadi karena sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir, SP2D beserta dokumen pertanggungjawaban atas belanja barang jasa tidak dapat ditunjukkan kepada BPK; (3). Kelemahan Pengelolaan Kas Daerah dan Kekurangan Kas Daerah yang terjadi karena rekayasa rekening koran dan SP2D. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan Kas di Kas Daerah; (4). Kelemahan penatausahaan dan pengelolaan Aset Tetap terjadi karena pengurus barang tidak melakukan pemutakhiran dan penginputan data aset tetap secara lengkap dan akurat, pengamanan aset tetap tidak memadai, penggunaan aset tetap tidak ditetapkan statusnya, dan kebijakan akuntansi yang belum disesuaikan dengan SAP. Permasalahan tersebut mengakibatkan aset tetap dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, dan pencatatan aset tetap tidak informatif serta tidak menunjukkan kondisi sebenarnya; dan (5). Kelemahan pencatatan dan mekanisme penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sehingga terdapat selisih pengakuan Utang PFK yang tidak dapat dikonfirmasi oleh pengadministrasi pajak. Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo Utang PFK tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Terkait dengan hal tersebut pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Provinsi NTB

➤➤➤ <https://jdih.ntbprov.go.id>

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali membuktikan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Raihan opini WTP dari BPK RI ini merupakan yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak 2011 hingga 2020. Keberhasilan Pemprov NTB ini merupakan wujud komitmen NTB bersama seluruh stakeholders dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah secara konsisten. Selain melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas dan pemanfaatan aset pada Pemprov NTB dan Instansi terkait lainnya. Opini WTP yang diperoleh Pemprov NTB, agar dapat diikuti juga dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran, menurunnya gini rasio, meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali. Diharapkan pemerintah tidak hanya mengejar opini WTP terkait penyajian laporan keuangan, tetapi juga terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin.

KAJIAN DAERAH

Dampak Opini BPK terhadap Capaian Layanan Publik

Pemberian opini oleh BPK merupakan suatu bentuk apresiasi atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, dimana laporan keuangan yang disusun merupakan perwujudan asas akuntabilitas dalam penggunaan anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, opini BPK juga dapat menunjukkan keunggulan sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diharapkan akan sejalan dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang merupakan modal penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat. Sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara tidak langsung diharapkan dapat mempengaruhi kualitas pembangunan di daerah dan berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat.



Kajian Pengaruh Opini BPK terhadap kesejahteraan masyarakat berupa pertumbuhan ekonomi menggunakan metode regresi panel dengan pilihan **fixed effect**.

Data panel adalah kombinasi antara data cross section dengan time series. Data dalam kajian ini digunakan adalah data makroekonomi 542 kabupaten/kota dengan periode tahun 2016-2020. Pilihan fixed effect dipilih berdasarkan hasil Hausman Test. Model panel fixed effect ini lebih cocok dipilih juga disebabkan karakteristik data dari setiap observasi yang memiliki kecenderungan intercept yang berbeda-beda dengan slope yang hampir sama ketika dilakukan regresi.

Untuk mengetahui pengaruh opini BPK terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, maka menggunakan beberapa variabel pendukung, diantaranya:



Variabel dependen dalam model adalah indikator kesejahteraan, dengan seluruh variabel dalam bentuk logaritma natural kecuali % penduduk miskin.

KAJIAN DAERAH

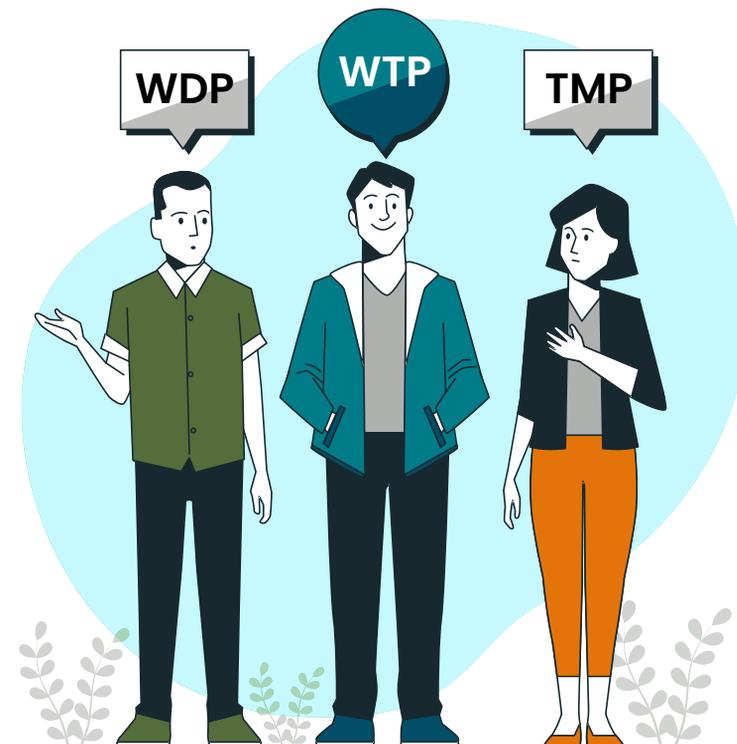
Secara matematis, model kajian pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\ln pdrbnmit = \alpha_1 + \beta_1 \ln pmtbit + \beta_2 \text{pendudukmiskinit} + \beta_3 \ln ikkit + \beta_4 \text{DopiniBPK} + \epsilon_{it}$$

Berdasarkan hasil dari model regresi diatas, terlihat bahwa terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi yang signifikan antara daerah yang mendapatkan opini BPK WTP dengan daerah yang mendapatkan opini WDP atau TMP. Daerah-daerah dengan opini BPK WDP memiliki PDRB Non Migas yang secara rata-rata lebih rendah 4,7% dari daerah dengan opini WTP. Sementara itu pada daerah dengan opini BPK TMP, PDRBnya secara rata-rata lebih rendah 9,9% dari daerah dengan opini WTP. Hasil ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, daerah dengan opini WTP memiliki PDRB non migas yg lebih besar dari daerah dengan opini WDP dan TMP.

Selain itu, terdapat beberapa variabel pendukung yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Investasi secara signifikan mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi dimana 1% kenaikan PMTB (investasi) akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,47%. Kemudian, Penduduk Miskin yang turun 1% secara signifikan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.057%. Sementara persentase kenaikan IKK belum terlalu berpengaruh signifikan teradap pertumbuhan ekonomi.

Regresi dari model tersebut dilakukan dengan metode fixed effect, dengan merujuk dari hasil uji hausman yang dilakukan. R Squared dari model tersebut adalah 80,22%, yang artinya variabel dependen yaitu PDRB non migas dipengaruhi sebesar 80,22% oleh variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 19,78% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.



Sumber Ilustrasi: freepik.com